

BAB II

ONE CHINA POLICY DALAM HUBUNGAN CROSS STRAIT RELATION TAIWAN-TIONGKOK

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai asal-usul Taiwan dan *One China Policy* dalam hubungan *cross-strait relation* Taiwan-Tiongkok. Kemudian, untuk mempermudah pemahaman bagaimana awal mula berdirinya Nasionalis KMT dan Komunis PKC, perlu adanya sedikit penjabaran tentang sejarah Tiongkok yang diawali dari revolusi 1949 atau yang dikenal dengan Perang Saudara. Kekalahan KMT yang diketuai Chiang Kai-Shek pada Perang Saudara membuatnya lari bersama jutaan pendukungnya ke Taiwan. Peristiwa tersebut adalah titik balik penyebab terjadinya *cross-strait relation* antara Tiongkok dan Taiwan.

2.1 Sejarah Pulau Ilha Formosa

Taiwan merupakan sebuah pulau yang dulu dikenal dengan nama *Ilha Formosa*, berasal dari bahasa Portugis yang artinya “pulau yang indah”.⁴⁸ Secara geografis Taiwan terletak di Asia Timur yang bersebelahan dengan Pantai Cina Daratan, sebelah utara berbatasan dengan Jepang, sedangkan sebelah barat berbatasan langsung dengan Tiongkok, dan sebelah selatan dekat dengan Filipina. Pada bagian timur Taiwan terhubung langsung dengan Samudra Pasifik, di sebelah selatan oleh Laut Cina Selatan dan Selat Luzon, di sebelah barat oleh Selat Taiwan,

⁴⁸Kementrian Luar negeri Republic of China (Taiwan), 2016, *Sekilas Republic of China 2016 (Taiwan)*, Taipei: Kementrian Luar negeri Republic of China (Taiwan), hal 20, diakses dalam http://multilingual.mofa.gov.tw/web/web_UTF-8/MOFA/glance2016/Indonesian.pdf (31/8/2017, 10:37 WIB)

dan sebelah utara Laut Cina Timur. Memiliki luas sekitar 36.000 km persegi dan beribukota di Taipei.⁴⁹ Jika dilihat dari letak geografisnya, Taiwan memiliki posisi yang sangat strategis yang berdekatan dengan Samudra Pasifik, Jepang, dan Asia Tenggara.⁵⁰



Gambar 2. 1 Peta Letak Geografis Taiwan⁵¹

Sebelum Taiwan mengklaim sebagai sebuah negara, Taiwan pernah merasakan berbagai pengalaman penjajahan oleh beberapa negara. Pada tahun 1500 Taiwan ditemukan oleh pelaut asal Portugis yang kemudian dijuluki dengan nama

⁴⁹ Yang Leprilian, *Implikasi Kebijakan One China Policy Terhadap Keamanan Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan periode tahun 2010-2014*, Journal of International Relations, Vol, 2, No, 3, 2016, Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, hal 75, diakses dalam <https://media.neliti.com/media/publications/135320-ID-none.pdf> (31/8/2017, 10:54 WIB)

⁵⁰ Chung-Te Chang, dkk, *The geography of Taiwan and meteorological stations, elevations, and major land cover types in Taiwan*, diakses dalam https://www.researchgate.net/figure/260024694_fig1_Figure-1-a-The-geography-of-Taiwan-and-b-meteorological-stations-points-elevation (31/8/2017, 11:22 WIB)

⁵¹ Wordatlas, Taiwan-Large Map, diakses dalam <http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/lcolor/twcolor.htm> (31/8/2017, 11:12 WIB)

Formosa. Kemudian Belanda datang ke Taiwan pada tahun 1624 dan mendirikan pangkalan dagang *Dutch East India*. Tetapi, penjajah Spanyol pada tahun 1626 berhasil menguasai wilayah utara Taiwan dengan mendirikan pangkalan, namun berhasil direbut oleh Belanda pada tahun 1642.⁵²

Pada tahun 1662-1683 datang seorang loyalis dari dinasti Ming yang bernama Cheng Cheng Kung berhasil membebaskan Taiwan dari tangan Belanda dan mendirikan kerajaan Tungning. Tidak lama kemudian, pada tahun 1644 dinasti Qing atau dikenal juga dinasti Manchuria yang berasal dari daratan Tiongkok berusaha memperluas kekuasaannya sampai ke pulau Taiwan. Serangan terus dilakukan hingga Taiwan berhasil direbut dari kerajaan Tungning di bawah pimpinan Laksamana Shi Lang. Akhirnya, pada tahun 1885 Taiwan dinyatakan sebagai provinsi kekaisaran dinasti Qing.⁵³ Pada saat kekuasaan berada di tangan kekaisaran Qing, pulau Formosa diubah menjadi Taiwan.⁵⁴ Nama Taiwan sendiri berasal dari bahasa Tiongkok “Tai” dan “wan” yang maknanya adalah tanah datar yang landai yang berada pada suatu teluk.⁵⁵

Pada tahun 1894 pasukan Jepang datang untuk memperluas wilayahnya, yang menyebabkan pecahnya Perang Sino-Jepang I antara dinasti Qing dan Jepang.⁵⁶ Namun dinasti Qing mengalami kekalahan yang ditandai dengan

⁵² Kementrian Luar negeri Republic of China (Taiwan), *Op. Cit.*, hal. 21

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Yuliana Y bambang Wiratmojo, *Peran Elemen linguistic sebagai Representasi Budaya China dalam Renaming brand Global*, hal. 62. diakses dalam <http://e-journal.uaej.ac.id/6496/3/KOM204035.pdf> (31/8/2017, 12.20 WIB)

⁵⁵ Ucup Supriyadi, *Fenomena Keberhasilan Negara Industri Baru sebagai Prototipe Pembangunan Ekonomi di Asia Tenggara*, Tesis, Jakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, hal. 21 diakses dalam lib.ui.ac.id/file?file=digital/116270-T%2024377-Fenomena%20keberhasilan...pdf (31/8/2017, 12:29 WIB)

penandatanganan perjanjian Shimonoseki pada tahun 1895. Dimana dinasti Qing menyerahkan kedaulatan atas Taiwan kepada Jepang.⁵⁷ Taiwan berada di bawah kekuasaan protektorat Jepang cukup lama yakni hingga kekalahan Jepang pada Perang Dunia II pada tahun 1945.⁵⁸ Akibat kekalahannya, Jepang harus memberikan sebagian wilayah jajahannya kepada sekutu, yaitu Taiwan kepada Tiongkok.

2.1.1 Pisahnya Taiwan dari Tiongkok hingga berdirinya Taiwan

Revolusi nasional di Tiongkok pecah 1911 yang bertujuan untuk menggulingkan Dinasti Qing yang menganut sistem *feodal* dan monarki, dimana pemerintahan bersifat turun-temurun. Selama pemerintahan dinasti Qing, kondisi rakyat Tiongkok sangat menderita akibat penindasan oleh kaum penguasa. Hal tersebut yang kemudian mendorong gerakan perubahan terutama bagi kalangan pelajar di Tiongkok.⁵⁹ Sun Yat Sen adalah seorang intelektual dan revolusioner yang berhasil memimpin Revolusi Tiongkok 1911, dan yang kemudian bercita-cita ingin menasionalisasikan atau melakukan demokratisasi di Tiongkok berdasarkan asas *San Min Chu*.⁶⁰ Akibat keberhasilan revolusi 1911, berdirilah Republik Tiongkok pada 1 Januari 1912 yang dipimpin oleh Sun Yat Sen.⁶¹ Namun, kursi

⁵⁷ Kementrian Luar negeri Republic of China (Taiwan), *Op. Cit.*, hal. 20-21

⁵⁸ Sterling Seagrave, 2015, *Sepak Terjang Para Taipan*, London: PT Pustaka Alvabet anggota IKAPI, hal. 269.

⁵⁹Febriana Windy Arisanti, Revolusi China, diakses dalam http://febrina-windy-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-87896-ldeide%20politik-Revolusi%20China.html (1/9/2017, 10:23 WIB)

⁶⁰Tiga Asas Kerakyatan yaitu Min Tsen (Nasionalisme), Min Chu (Demokrasi), dan Min Sheng (Kesejahteraan/Sosialisme) Lihat Drs. Leo Agung S., M. PD, 2016, *Sejarah Asia Timur*, Eds. 2, Yogyakarta: Ombak, hal. 1.

⁶¹Deni Adi Wijaya, *Konflik Perebutan Kekuasaan antara Kaum Nasionalis dan Komunis di Republik Tiongkok Tahun 1912-1949*, Jember: Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial, UNEJ, hal. 2. Diakses dalam <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/63534/DENI%20ADI%20WIJAYA.pdf;sequence=1> (1/9/2017, 10:50 WIB)

kepemimpinan tidak berlangsung lama karena Sun Yat Sen digantikan oleh Yuan Shih Kai, seorang *warlord* atau panglima perang yang sangat berpengaruh. Sementara Sun Yat Sen mengundurkan diri ke Kanton dan mendirikan Partai Nasionalis *Koumintang* pada tahun 1912.⁶²

Revolusi tahap dua kembali pecah pada tahun 1928, pasca meninggalnya Yuan Shih Kai. Hal ini disebabkan oleh peperangan yang terjadi diantara para *warlord* untuk saling berebut kekuasaan khususnya di bagian utara Tiongkok, karena ketiadaan seorang panglima yang diakui sebagai pemimpin.⁶³ Sedangkan di wilayah Tiongkok bagian selatan, Sun Yat Sen diangkat sebagai kepala pergerakan republik dan diangkat kembali menjadi presiden di Kanton pada 21 Januari 1921.⁶⁴ Pada masa transisi kekuasaan inilah yang menimbulkan masuknya paham komunis. Karena untuk mencapai cita-citanya, Sun Yat Sen melakukan reorganisir partainya pada tahun 1923 dengan Rusia sebagai partnernya, yang waktu itu Amerika Serikat dan Inggris dalam Konfrensi Washington menolak reorganisasi Sun Yat Sen dengan alasan lebih ingin menjalin hubungan dagang.⁶⁵

Sehingga, hal tersebut memudahkan Rusia untuk menyebarkan paham komunisnya. Hal ini demikian, karena pasca kemenangan Partai Komunis menggulingkan Kaisar Tsar II dalam Revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917. Rusia berencana untuk mendirikan cabang Komunis Internasional yang mengatur

⁶² *Ibid.*

⁶³ Ririn Darini, M. Hum, *Garis besar Sejarah China Era Mao*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta, hal. 16. diakses dalam <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132233219/pendidikan/Garis+Besar+Sej+Cina+Era+Mao.pdf> (2/9/2017, 11:00 WIB).

⁶⁴ Deni Adi Wijaya, *Op. Cit.*, hal 5

⁶⁵ Drs. Leo Agung., M. PD, *Op. Cit.*, hal. 2.

pendirian Partai Komunis di Tiongkok.⁶⁶ Dalam hal ini Sun Yat Sen ingin pemerintahan Tiongkok dimonopoli oleh satu partai yakni KMT, yang mana kemudian Sun Yat Sen mencontoh program pelaksanaan birokrasi Rusia. Oleh karena itu, Sun Yat Sen menerima kaum komunis dalam partai KMT karena Ia yakin bahwa komunis Rusia tidak dapat hidup di Tiongkok yang kondisinya berlainan. Pada 1 Juli 1921, terjalin kesepakatan antara Rusia dan pemerintahan Sun Yat Sen untuk mendirikan perkumpulan kaum Komunis atau yang dikenal dengan PKC.⁶⁷

Bahkan Sun Yat Sen mengirim utusan di bawah pimpinan Chiang Kai Shek untuk belajar organisasi dan latihan Tentara Merah di Rusia. Hingga pada tahun 1923 Chiang Kai Shek kembali ke Tiongkok bersama penasehat-penasehat Rusia seperti: Jendral Galens, Blucher, dan Michael Borodin yang akan menjadi konsultan militer KMT. Dari situlah lahirlah intelektual kiri Tiongkok seperti: Li Li Shan, Wang Ching Wei, Li Dazhao, Chen Duxio, Ling Biao, Mao Zedong.⁶⁸ Kemudian pada tahun 1924 didukung oleh Sun Yat Sen, Chiang Kai Shek mendirikan Akademi Militer di Whampoa, dekat Kanton, untuk membangun tentara nasionalis KMT.⁶⁹ Akan tetapi, pada tanggal 12 Maret 1925 Sun Yat Sen wafat sebelum cita-citanya terwujud untuk menyatukan daratan Tiongkok di bawah

⁶⁶ 9 Komentar Mengenai Partai Komunis Tiongkok, Epoch Times Erabaru, 15 September 2015, diakses dalam <http://www.erabaru.net/2015/09/15/9-komentar-mengenai-partai-komunis-tiongkok-1/2/> (2/12/2017, 11:59 WIB)

⁶⁷ *Sejarah Revolusi Cina 1949 dan Munculnya Dua Cina*, umy.ac.id, hal. 17-18. Diakses dalam <http://thesis.umsu.ac.id/datapublik/t48097.pdf> (3/12/2017, 12:58 WIB)

⁶⁸ Deni Wijaya, *Op. Cit.*, hal. 5.

⁶⁹ Walter Breindl, What Does Chiang Kai-Shek Really Mean for Taiwan, diakses dalam <http://gec.cpu.edu.tw/ezfiles/91/1091/img/385/198026059.pdf> hal. 162-163. (2/9/2017, 11:25 WIB)

pemerintahan pusat yang demokratis. Kemudian setelah wafatnya Sun Yat Sen, pimpinan partai KMT diambil alih oleh Chiang Kai Shek.⁷⁰

Pada awal kepemimpinannya, Chiang Kai Shek bekerja sama dengan pihak Komunis untuk menghancurkan para *warlord* yang tidak bersedia tunduk pada pemerintahan pusat. Upayanya untuk menaklukkan wilayah-wilayah Tiongkok terus dilakukan, hingga Chiang Kai Shek berhasil merebut dua kota besar yaitu Nanking dan Shanghai. Di Nanking inilah berdiri markas besar Chiang Kai Shek. Kerekatan hubungan KMT dan PKC mulai memudar akibat perselisihan tanah. Kaum Komunis menghendaki pembagian tanah di daerah-daerah yang telah direbutnya kepada para petani, tetapi Chiang Kai Shek menolaknya. Hal ini menimbulkan kecurigaan diantara keduanya dan saling menuduh untuk mencari keuntungan.

Pada 12 April 1927 Chiang Kai Shek berhasrat menghancurkan orang-orang komunis yang tidak bersedia tunduk pada pemerintah pusat.⁷¹ Melihat hal tersebut, Mao Zedong memperkuat diri dengan mendekati para buruh dan petani yang anti Chiang Kai Shek. Pada 1 Agustus 1927 meletus pemberontakan Komunis di ibu kota provinsi Kiangsi,⁷² tapi pemberontakan tersebut gagal karena pasukan Komunis kalah jumlah persenjataan dan pasukan tentara. Pasukan Komunis yang masih tersisa lari ke daerah pedalaman dan pegunungan untuk melancarkan serangan balik. Chiang Kai Shek sendiri terus melakukan tindakan pembasmian terhadap Komunis untuk mengakhiri riwayat komunis.

⁷⁰Drs. Leo Agung., M. PD, *Op. Cit.*, hal. 3-7

⁷¹ *Ibid.*, hal. 9.

⁷² *Ibid.*, hal. 10.

Sementara KMT sedang sibuk melakukan penyerangan terus-menerus terhadap Komunis. Pasukan Jepang kembali berusaha menduduki Tiongkok dan berhasil merebut Nanking, ibu kota Tiongkok pada 13 Desember 1937.⁷³ Karena KMT tidak mampu menghadapi serangan Jepang. Kemudian, pihak KMT dan PKC kembali membentuk persatuan. Namun, Mao Zedong menolak berada di bawah pengaruh KMT. Mao Zedong memanfaatkan momen tersebut dengan memperkuat basis PKC dan mengontrol Pasukan Tentara Merah. Ia juga membuat strategi serangan propaganda untuk melawan KMT. Mao melakukan perjalanan *the Long March*⁷⁴ pada 16 Oktober 1934 sampai 19 Oktober 1935 agar dapat menerobos dari kepungan KMT dan terlindung dari ancaman KMT.⁷⁵

Agar mendapatkan dukungan rakyat Tiongkok yang sebagian besar adalah petani dibuat kebijakan *Landreform*, dengan memberikan janji kepada kaum yang tidak bertanah dan para petani untuk dapat merebut tanah dari tuan tanah, apabila mereka mau berjuang untuk kaum Komunis. Prajurit KMT yang ditangkap, tidak dibunuh dan diperlakukan buruk, tetapi mereka diberi makan, perawatan medis, dan

⁷³ Serangan tentara Jepang di Manchuria dengan melakukan rekayasa peledakan jalur kereta api dekat dengan 'Mukden' sekarang 'Shenyang' yang kemudian dikenal dengan 'Insiden Mukden' guna merebut wilayah Manchuria, bagian Tiongkok Utara yang kaya sumber daya alam. Puncak dari kejayaan agresi Jepang di Tiongkok adalah pemerkosaan di Nanking yang menjadi tragedi penghinaan bagi Tiongkok. Lihat di *Akar Dendam China terhadap Jepang*, Kompas, 20 September 2012, diakses dalam

<http://internasional.kompas.com/read/2012/09/20/0812456/Akar.Dendam.Panjang.China.kepada.Jepang> (3/12/2017, 21:38 WIB)

⁷⁴ Perjalanan panjang Mao Zedong dan pengikutnya melewati pegunungan, sungai, dan daerah yang sulit dijangkau KMT. Melalui *long march*, komunis berjuang mempertahankan diri dari serangan dan ancaman KMT, menyebarkan paham komunis, dan menyuarakan semboyan anti tuan tanah, anti kaum modal, dan di Yan'an provinsi Shaanxi, Tiongkok di bagian barat laut adalah tempat strategis Komunis mendekatkan diri pada Uni Soviet untuk menghimpun kekuatan.

⁷⁵ Lihat Harrison E. Salisbury, 1985, *The long March: The Untold Story*, New York: Harper & Row Publishers, hal. 59-66.

dijejali paham-paham yang mengutuk rezim Chiang Kai Shek. Supaya mereka benci terhadap pemerintahan Chiang Kai Shek.⁷⁶

Akibat kekalahan pada Perang Dunia II pada 14 Agustus 1945 membuat Jepang menyerah kepada Sekutu.⁷⁷ Hal ini menandai kemenangan Tiongkok atas Jepang dalam perang Tiongkok-Jepang. Kekuasaan pemerintahan Jepang atas Taiwan juga berpindah kala itu ke Tiongkok. Penyerahan kekuasaan dilakukan oleh Jepang dengan penandatanganan Instrumen Penyerahan pada tanggal 15 Agustus 1945, dan penyerahan secara formal pada tanggal 25 Oktober 1945.⁷⁸ Penyerahan secara formal dilaksanakan oleh pemerintahan Jepang dan Pasukan Sekutu yang diwakili pemerintahan KMT dibawah Chiang Kai-Shek, yang menunjukan Jepang menyerahkan wewenang untuk memerintah Taiwan kepada Tiongkok.⁷⁹ Setelah itu, Chiang Kai-Shek menetapkan Taiwan untuk berada di bawah pemerintah darurat militer, dengan jendral Chen Yi menjadi Gubernur di Taiwan.⁸⁰

Akan tetapi, pasca menyerahnya Jepang kepada pihak sekutu, keadaan Tiongkok semakin memburuk. Karena KMT dan PKC saling berebut posisi di Tiongkok. Pasukan KMT yang lebih dulu menaklukan kota-kota besar, mulai

⁷⁶ Drs. Leo Agung S., M. PD, *Op. Cit.*, hal. 14-17.

⁷⁷ Dani Setiawan, *Kebijakan Ekonomi di Jepang Pada Masa Kependudukan Sekutu*, Skripsi, Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Jepang, Universitas Indonesia, hal. 2.

⁷⁸ Fahmi Islami, 2013, *Kebijakan Luar Negeri Taiwan Di Bawah Presiden Ma Ying-Jeou (2008-2012) Di Bidang Keamanan, Ekonomi, dan Identitas dalam Hubungan antara Selat Taiwan dan Cina*, Skripsi, Depok: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, hal.71. diakses dalam lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350947-TA-Fahmi%20Islami.pdf (2/9/2017, 12:00 WIB).

⁸⁰ Dyah Nurriszina Nugraheni, *Taiwan dan Dilema Hubungan Dengan Tiongkok*, diakses dalam [http://dyahnugraheni-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-135327-MBP%20Asia%20Timur-TAIWAN%20DAN%20DILEMA%20HUBUNGAN%20DENGAN%20TIONGKOK%20\(week%207\).html](http://dyahnugraheni-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-135327-MBP%20Asia%20Timur-TAIWAN%20DAN%20DILEMA%20HUBUNGAN%20DENGAN%20TIONGKOK%20(week%207).html) (3/9/2017, 11:36 WIB)

khawatir dengan Tentara Merah yang lebih dulu menguasai daerah pedesaan dan pegunungan yang sangat luas dan dengan cepat dapat menguasai daerah-daerah bekas kependudukan Jepang. Oleh karenanya, Chiang Kai Shek meminta bantuan AS untuk menyelesaikan permasalahan di Tiongkok. AS dibawah presiden Harry S. Truman mengutus Jendral George C. Marshall pada 15 Desember 1945 yang bertindak sebagai mediator persengketaan antara Nasionalis-Komunis. Namun, sepeninggal Marshall pertempuran antara KMT-PKC semakin meluas. Hingga pecahnya Perang Saudara 1945.⁸¹

Komunis yang sudah menguasai Tiongkok bagian utara mulai merambah ke bagian selatan sungai Yang Tze, dan berhasil merebut markas KMT di Nanking. Kemudian, KMT memindahkan markasnya ke Kanton. Hal ini membuat Chiang Kai Shek bertindak kejam dan diktator, bahkan Ia membunuh siapapun yang tidak bersedia mendukungnya. Sedangkan PKC memanfaatkan hal tersebut untuk menarik simpati rakyat Tiongkok. Kekuasaan Komunis yang semakin meluas membuat Mao Zedong mulai mempersiapkan pembentukan Tiongkok yang dicitakan Komunis. Jumlah pendukung yang semakin besar membawa kemenangan pihak Komunis. PKC berhasil menyingkirkan KMT pada 1 Oktober 1949, dan memproklamasikan berdirinya Tiongkok yang beribukota di Beijing. Sedangkan Chiang Kai Shek yang mengalami kekalahan perang bersama pengikutnya lari menuju Taiwan.⁸²

⁸¹Ririn Darini, M. Hum, *Op. Cit.*, hal. 20-21.

⁸²Aisha Bibi Binti Kamaruddin, Sejarah Tercetusnya Perang Saudara di China (1946-1949), Malaysia: University Malaya, hal. 715-719. Diakses dalam <https://worldconferences.net/proceedings/icssr2015/full%20paper/IC%20042%20SEJARAH%20TERCETUSNYA%20PERANG%20SAUDARA%20DI%20CHINA%20-%20AISHA%20BIBI.pdf> (3/9/2017, 10:26 WIB)

2.2 Kebijakan Taiwan terkait *One China Policy* dalam hubungan *Cross-Strait Relation* Taiwan-Tiongkok

2.2.1 Taiwan di bawah pemerintahan Chiang Kai Shek

Pasca kekalahan KMT dari PKC pada tahun 1949, Chiang Kai-Shek ketua Nasionalis KMT lari menuju Taiwan dengan membawa kurang lebih dua juta pengungsi dari daratan Tiongkok.⁸³ Setibanya di Taiwan pada awalnya Chiang Kai Shek bertekad untuk membangun Taiwan sebagai benteng militer dengan tujuan melakukan serangan balik ke daratan Tiongkok untuk menggulingkan PKC.⁸⁴ Karena Chiang Kai Shek masih menganggap bahwa Tiongkok masih dalam naungan pemerintahan KMT dan Tiongkok hanya diduduki sementara oleh Komunis. Hal ini terlihat dengan penempatan tentara militer di Pulau Jinmen dan Pulau Mazu sebagai persiapan penyerangan ke daratan Tiongkok.⁸⁵

Chiang Kai Shek yang bercita-cita akan kembalinya KMT ke daratan Tiongkok untuk menggulingkan PKC, menolak demokrasi di Taiwan. Hal ini dilakukan, karena dia harus konsisten dengan deklarasinya, bahwa pemerintahannya mewakili seluruh Tiongkok, bukan Taiwan saja. Artinya, pada saat itu Jepang mengamanatkan agar Taiwan dikembalikan kepada Tiongkok yang dikuasai KMT. Kondisi tersebut yang menciptakan adanya dualisme klaim atas nama 'Cina'. 'Cina' yang diwakili PKC yang memegang kekuasaan di wilayah

⁸³Totok Sudjatmiko, Upaya Cina-Taiwan untuk bergabung dalam International Space Station: Satu Kajian diplomasi, hal. 112 diakses dalam <http://repository.lapan.go.id/repository/630-548-2-PB.pdf> (4/9/2017, 11:02 WIB)

⁸⁴ Kerry Dumbaugh, *Taiwan's Political Status: Historical Background and It's Implications for U.S Policy*, hal.1 diakses dalam <https://fas.org/sgp/crs/row/RS22388.pdf> diakses dalam (4/9/2017, 12:10 WIB)

⁸⁵ *The Taiwan Strait Crises: 1954-55 and 1958*, U. S. Departement of State, diakses dalam <https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/lw/88751.htm> (29/9/2017, 22:46 WIB).

daratan Tiongkok dan 'Cina' yang diwakili Nasionalis KMT yang memegang kendali pemerintahan di wilayah Taiwan.⁸⁶

Tetapi, Kenyataan pahit yang dialami Chiang Kai Shek adalah Taiwan di bawah Jendral Chen Yi, mengalami masa-masa kelam di bidang ekonomi akibat berbagai kebijakan yang sangat merugikan, terutama bagi masyarakat Taiwan.⁸⁷ Kondisi tersebut memaksa Chiang Kai-Shek untuk melakukan upaya perbaikan di Taiwan demi keberlangsungan KMT, terutama perbaikan ekonomi.⁸⁸ Namun, perbaikan tersebut tidak dibarengi dengan perbaikan politik di dalam negeri Taiwan itu sendiri. Otoritarianisme Chiang dilakukan dengan menyingkirkan lawan-lawan politiknya, dan melarang berdirinya partai politik oposisi. Bahkan Ia melakukan penculikan dan pembunuhan kepada orang-orang yang dinilai mengancam KMT.⁸⁹

Perbedaan dua identitas antara *mainlander* (penduduk pendatang dari daratan Tiongkok) dan penduduk asli Taiwan. Membuat Chiang Kai Shek menerapkan kebijakan untuk membentuk identitas masyarakat Taiwan agar merasa menjadi bagian dari Tiongkok. Beberapa kebijakannya antara lain adalah *Pertama*, mengeluarkan kebijakan nasionalisasi 'Bahasa Nasional' yaitu bahasa mandarin.

⁸⁶ Toward "One Taiwan, One China" Discard outdated "One China" policy, TAIWAN COMMUNIQUE, hal. 3. Diakses dalam <http://www.taiwandc.org/twcom/tc71-int.pdf> (1/11/2017, 10:41 WIB).

⁸⁷Jendral Chen Yi menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang merugikan masyarakat Taiwan. Salah satunya yakni menaikkan harga-harga pangan dan barang, bahkan menjual aset-aset Taiwan ke Tiongkok dan mengambil keuntungan darinya. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan antara penduduk asli Taiwan terhadap *mainlander* (pendatang dari daratan Tiongkok). Akibatnya pecah insiden 288 pada tahun 1947 sebagai aksi protes penduduk Taiwan asli, dan pada tahun 1995 Presiden Lee Teng Hui mendirikan Tugu peringatan 288 dengan menandai 28 Februari sebagai hari peringatan. Lihat di Angelia Lu Fulton, *Taiwan Remembers 1947 Massacre*, diakses dalam https://world.wng.org/2015/03/taiwan_remembers_1947_massacre (4/9/2017, 11:41 WIB)

⁸⁸Walter Breindl, *Op. Cit.*, hal. 166.

⁸⁹Thomas J. Shattuck, *Taiwan's White Terror: Rememberring 288 Incident*, Foreign Policy Research Institute, diakses dalam <https://www.fpri.org/article/2017/02/taiwans-white-terror-remembering-228-incident/> (5/9/2017, 12:32 WIB)

Kedua, nasionalisasi instrument-instrument harian di masyarakat Taiwan, perhitungan tahun diubah dengan menetapkan 1912 sebagai *Year One*. Nama-nama jalan juga dirubah dengan menggunakan nama yang datang dari Tiongkok. *Ketiga*, pemberlakuan nasionalisasi juga terjadi di lingkungan sekolah, dimana para murid diharuskan mengenal symbol-simbol nasional Tiongkok. Penghormatan terhadap bendera, lagu nasional, dan foto Sun Yat-Sen (pendiri Republik Tiongkok) dan Chiang Kai-Shek di tiap ruang kelas.⁹⁰

Dinamika hubungan Taiwan-Tiongkok yang semakin berbuntut panjang pada masa pemerintahan Chiang Kai Shek tidak lepas dari dinamika global Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Rusia. Keterlibatan Amerika Serikat dan hubungan lintas selat dimulai sejak Amerika Serikat menempatkan armada kapal perangnya di Selat Taiwan pada 1950 untuk menahan laju Komunisme yang sedang bergejolak di Perang Semenanjung Korea. Amerika Serikat semakin terlibat dalam konflik Taiwan-Tiongkok sejak penandatanganan Traktat Pertahanan antara Amerika Serikat dan Taiwan pada tahun 1954. Konflik terus berlanjut antara Taiwan yang dibantu Amerika Serikat dan Tiongkok yang dibantu Rusia.⁹¹

Namun, perang sipil berangsur-angsur mulai berubah menjadi perang diplomatis untuk mencari pengakuan dari negara-negara lain sebagai pemerintahan sah yang mewakili daratan Tiongkok. Perubahan sikap tersebut terjadi akibat

⁹⁰ Christoper Hughes, 1997, *Taiwan and Chinese nationalism: National identity and status in international society*, London and New York: Routledge, hal. 29-30.

⁹¹ Phil Deans, *Cross-Strait Relations Since 1949: From Radicalism to Conservatism and Back Again*, Research Gate, hal. 25, diakses dalam https://www.researchgate.net/publication/5080022_Cross-Strait_Relations_since_1949_From_Radicalism_to_Conservatism_and_Back_Again, (30/9/2017, 11.00 WIB).

tekanan dari Amerika Serikat dan Rusia untuk mengakhiri serangan-serangan militer. Serangan agresi militer yang terus diluncurkan Tiongkok kepada Taiwan menjadi peluang Amerika Serikat untuk mendekati Tiongkok melalui pendekatan HAM. Amerika Serikat memberikan peringatan kepada Tiongkok melalui *1955 congressional resolution* oleh Presiden Dwight. D Eisenhower. Bahkan Amerika mengancam akan menggunakan nuklir untuk melindungi agresi Tiongkok terhadap Taiwan. Kemudian, Tiongkok mencoba mengimbangi daya Amerika dengan menghentikan serangan agresi, dan mencoba bernegosiasi.⁹²

Kondisi KMT yang makin melemah akibat kedudukan PKC memaksa Chiang Kai Shek bersama jutaan pengikutnya mengungsi atau lari ke Taiwan. Terlihat bahwa tujuan orang-orang KMT ke Taiwan untuk sementara. Chiang Kai Shek yang menganggap bahwa Tiongkok masih dalam naungan pemerintah KMT menjelaskan, bahwa Ia tidak menginginkan Taiwan yang berdaulat sendiri. Terlepas dari ide untuk mendirikan Taiwan yang independen, Chiang Kai-Shek pada saat itu lebih fokus pada cita-cita pendiri KMT yakni menyatukan daratan Tiongkok menjadi negara demokratis. Meskipun sebenarnya di era kepemimpinannya, masih sangat jauh dari kesan demokratis karena hanya ada kekuasaan satu partai saja yang terpusat yaitu KMT. Sikap kediktatorannya juga sangat bertentangan dengan asas demokrasi *San Min Chu* yang dicita-citakan oleh Sun Yat Sen merupakan salah satu penyebab kekalahan KMT di Tiongkok.

⁹² Fiqqarahmadani Yustiazhari, *Op. Cit* diakses dalam http://fyustiazari-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-119186-PPLN-Analisis%20Perubahan%20Kebijakan%20Cina%20dalam%20Upaya%20Reunifikasi%20CinaTaiwan.html (8/11/2017, 10:15 WIB)

Akantetapi, dalam hubungan *cross-strait relation* Tiongkok-Taiwan, Ia masih menolak keberadaan PKC sebagai pemerintah di Tiongkok. Dalam hal ini, terkait prinsip *One China Policy* dalam pandangan Chiang Kai Shek adalah Ia lebih prounifikasi yang melihat Tiongkok dan Taiwan adalah satu kesatuan. Maka dari itu, Taiwan dianggap tempat pelarian yang tepat, karena Taiwan merupakan wilayah pemberian dari pemerintahan Jepang kepada nasionalis KMT di Tiongkok. Ketika orang-orang KMT mengklaim bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok pada masa Chiang Kai-Shek. Karena mereka adalah orang-orang asli Tiongkok yang terusir dari negaranya sendiri dan mengungsi di Taiwan karena kedudukan orang-orang PKC di Tiongkok.

2.2.2 Taiwan di bawah pemerintahan Chiang Cheng Kuo

Kebijakan yang diterapkan Chiang Kai Shek hingga kematiannya pada tahun 1975 dan digantikan oleh anaknya Ching Cheng Kuo membuat posisi Taiwan semakin terkucilkan di dunia internasional.⁹³ Pengaruh kekuatan Tiongkok semakin kuat sejak terjadinya normalisasi hubungan Amerika Serikat-Tiongkok. Taiwan harus memutuskan hubungan diplomatik terhadap negara-negara yang mengakui bahwa Tiongkok adalah satu-satunya pemerintahan yang sah mewakili seluruh daratan Tiongkok termasuk Taiwan. Karena KMT tidak lagi dianggap sah menjadi perwakilan Tiongkok di PBB, melihat Tiongkok berada dalam kekuasaan PKC. Hingga pada tahun 1971, Taiwan dikeluarkan dari representasi Tiongkok di PBB.⁹⁴

⁹³ Cristopher Hugest, *Op. Cit.* hal. 29-30.

⁹⁴ Monique Chu, *Taiwan and the United Nations- Withdrawal in 1971 was an historic turning point*, *Taipei Times*, diakses dalam <http://www.taipeitimes.com/News/local/archives/2001/09/12/102595> (5/9/2017, 22:15 WIB)

Pada masa pemerintahan Chiang Ching-kuo, ruang gerak Taiwan semakin sempit. Upaya Tiongkok melakukan normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat menghasilkan *U.S-Cina Joint Communiqué* pada 17 Agustus 1979. Berdasarkan kesepakatan tersebut Amerika Serikat mengakui hanya ada satu Cina yang sah yaitu Tiongkok, dan Taiwan adalah bagian dari Tiongkok.⁹⁵ Kondisi tersebut mendorong Ching Cheng Kuo untuk membuat kebijakan terhadap Tiongkok '*Three no policy*'.⁹⁶ Artinya tidak ada kontak, negosiasi, dan kompromi antara Taiwan-Tiongkok.⁹⁷

Posisi Taiwan yang semakin terkucilkan oleh dunia internasional menjadi peluang emas bagi Tiongkok untuk menarik Taiwan unifikasi. Tiongkok yang dipimpin oleh Deng Xioping 1979 mengalami krisis ekonomi akibat peninggalan rezim Mao Zedong. Kemudian, ia mencoba membangun perekonomian Tiongkok melalui modernisasi ekonomi. Deng Xioping mengubah arah kebijakan pada masa Mao Zedong yang *military liberations* menjadi *peaceful unification*. Ia mengeluarkan kebijakan *One China Policy* yang diimplementasikan dalam *One State Two System* yang maknanya adalah negara yang berhubungan diplomatik

⁹⁵ Kerry Dumbaugh, *Taiwan's Political Status: Historical Background and Ongoing Implications* Congressional, Research Servis, hal.1

⁹⁶Kebijakan *three no policy* adalah kebijakan untuk memutuskan hubungan dengan Tiongkok yang artinya tidak ada kontak dengan Tiongkok, tidak akan bernegosiasi dengan PKC, dan tidak akan berkompromi dengan musuh 'Tiongkok'. Lihat di ⁹⁶ Pei Ling-Lee, *Decoding the Anti Secession Law: The Analysis of the Conflicts Across the Taiwan Strait*, G-Sec Working Paper, hal. 4. Diakses dalam https://www1.gsec.keio.ac.jp/imgdata/working/8_pdf.pdf (11/12/2016, 21:48 WIB).

⁹⁷*Is Taiwan Country or part of China, Wonder Why*, Published 29 Dec 2016, diakses dalam <https://www.youtube.com/watch?v=KQTtwh2GRME> (5/9/2017, 22:44 WIB)

dengan Tiongkok maka negara tersebut harus memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan.⁹⁸

Akibat kebijakan tersebut, banyak negara-negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kebijakan tersebut dibuat untuk lebih mempersempit ruang gerak Taiwan. Menarik Taiwan agar bersedia bekerjasama agar tercipta interdependensi ekonomi Taiwan-Tiongkok. Dengan harapan kemudian Taiwan akan bersedia reunifikasi. Unsur stabilitas digunakan untuk menekan pertumbuhan ekonomi, termasuk perdamaian dan stabilitas hubungan Taiwan-Tiongkok.⁹⁹ Namun, untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok, Amerika Serikat kemudian membuat kesepakatan *Taiwan Relations Act* pada tahun 1979 terkait perdagangan persenjataan.¹⁰⁰ Berdasarkan kesepakatan tersebut Amerika Serikat akan melindungi dan membantu Taiwan apabila Tiongkok melakukan penyerangan. Dengan alasan bahwa AS mendukung Taiwan sebagai demokratisasi di Taiwan, bukan sebagai negara *independence* dan tetap menghormati *One China Policy*.¹⁰¹

Sementara itu di Taiwan, Chiang Cheng Kuo berusaha mengubah implementasi *One China Policy* yang diterapkan ayahnya ke arah yang lebih fleksibel yakni didasari oleh kepentingan Taiwan terutama eksistensi Taiwan di

⁹⁸ I Gede Prayogi, *Op. Cit*, hal 3 diakses dalam

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=195983&val=5807&title=UPAYA%20REUNIFIKASI%20TAIWAN%20DITINJAU%20DARI%20PERKEMBANGAN%20KONFLIK%20SELAT%20TAIWAN%20PERIODE%201981-1991> (8/11/2017, 11:42)

⁹⁹ Yan Anlin, 2011, *Cross-Taiwan Straits Relations Since 1979: Policy Adjustment and Institutional Change Across the strait*, Ed, Kevin G. Cai, Singapore: Word Scientific Publishing, hal. 25

¹⁰⁰ Yosias Marion Arthur Wabiser, *The Sino-US Relationship: Studi Kasus Kebijakan Amerika Serikat Terhadap One China Policy*, diakses dalam

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/16371/10674> (8/11/2017, 11:28 WIB)

¹⁰¹ James CP Chang, *U.S. Policy Toward Taiwan*, diakses dalam

<https://programs.wcfia.harvard.edu/files/fellows/files/chang.pdf> (1/11/2017, 22.01 WIB)

lingkup internasional. Hal ini, menandai perubahan keteguhan KMT terhadap prinsip *One China Policy*. Terlihat bahwa Chiang Cheng Kuo lebih memilih sikap menolak reunifikasi. Karena Ia menginginkan pengakuan kedaulatan Taiwan di lingkup internasional, terutama untuk mempertahankan legitimasi KMT.

Taiwan lebih membuka diri untuk melakukan hubungan diplomatik melalui kantor-kantor budaya dan perdagangan, meski hubungan diplomatik secara penuh mungkin tidak terjadi. Taiwan juga berusaha untuk ikut serta dalam organisasi internasional meskipun selalu mendapat tekanan dari Tiongkok. Sehingga Taiwan hanya mampu memasuki organisasi internasional atau *event* internasional dalam bidang budaya, ekonomi, atau olahraga.¹⁰²

Secara internal, Chiang Ching Kuo juga mulai melakukan reformasi demokratisasi. Ia mulai melonggarkan sistem otoriter yang diterapkan pada masa pemerintahan ayahnya. Perubahan susunan KMT dilakukan melalui pembukaan rekrutmen anggota KMT kepada orang-orang asli Taiwan yang sebelumnya mayoritas anggota KMT adalah *mainlander*. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan yang terjadi antara *mainlander* dan penduduk asli Taiwan. Sehingga dukungan masyarakat Taiwan terhadap KMT akan semakin kuat. Selain itu, Ia juga mentolerir berdirinya partai oposisi DPP dan menghapus pemerintahan darurat militer. Oleh karenanya, dapat dilihat bahwa di masa Chiang Ching Kuo, Ia mulai memberikan kebebasan publik untuk menyuarakan pendapat, hak, dan aspirasinya.¹⁰³

¹⁰² The Editors of Encyclopedia, Chiang Ching Kou President of Taiwan, diakses dalam <https://www.britannica.com/biography/Chiang-Ching-kuo> (5/9/2017, 00:12 WIB)

¹⁰³ Ulf Hansson, *Chiang Ching Kuo a Motive Analysis*, Lund Universitet: Statsvetenskapliga Institutionen, diakses dalam

2.2.3 Taiwan di bawah pemerintahan Lee Teng Hui

Pasca kematian Chiang Ching Kuo, pada tahun 1988 Lee Teng Hui dinobatkan menjadi pengganti kursi kepresidenan. Lee Teng Hui ditunjuk sebagai Presiden Taiwan pertama yang merupakan orang asli Taiwan. Hal ini bertujuan agar ada orang asli Taiwan yang dapat mempertahankan relevansi dan legitimasi Nasionalis KMT. Lahirnya orang-orang asli Taiwan mendorong adanya gerakan-gerakan perbaikan di Taiwan dan perbaikan perlakuan terhadap penduduk asli Taiwan yang dulunya tidak diperhatikan oleh pemerintahan KMT.¹⁰⁴

Pada awal pemerintahan, Lee Teng Hui sudah terlihat membawa dampak yang cukup besar terutama di bidang politik dalam proses taiwanisasi menggantikan nasionalisasi Tiongkok yang dibawa oleh presiden sebelumnya. Ia mulai menarik orang-orang asli Taiwan untuk memegang jabatan di KMT. Karena, di masa rezim sebelumnya meski populasi penduduk orang asli Taiwan sebanyak 85% dari jumlah penduduk Taiwan.¹⁰⁵ Tetapi hanya sedikit dari mereka yang menjabat di kursi pemerintahan. Selain itu, kebebasan politik yang sebelumnya masih ditutup rapat-tapat oleh presiden pendahulunya, Lee Teng Hui mulai terbuka dan membiarkan berdirinya DPP. Lee Teng Hui lebih menerapkan sistem politik yang lebih demokratis. Meski pada masa Lee Teng-hui kekuasaan masih terpusat pada partai KMT.¹⁰⁶

<http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordId=1319621&fileId=1319622> (6/12/2017, 21:53 WIB).

¹⁰⁴ Jonathan Manthorpe, 2005, *Forbidden Nation: A History of Taiwan*, New York: Palgrave Macmillan, hal. 219.

¹⁰⁵ Bruce Jacobs, *Lee Teng Hui and the Idea of Taiwan*, diakses dalam https://www.researchgate.net/publication/231978539_Lee_Teng-hui_and_the_Idea_of_Taiwan (8/11/2017, 22:14 WIB)

¹⁰⁶ *Ibid.*

Terkait hubungan *cross-strait relations* Taiwan-Tiongkok, pemerintahan Lee Teng Hui lebih mengedepankan upaya-upaya diplomatik dalam menyikapi Tiongkok. Pada tahun 1991, presiden Lee membentuk Dewan Unifikasi Nasional yang menghasilkan *Guideline on National Reunification*.¹⁰⁷ Selain itu Taiwan juga membuka periode baru hubungannya dengan Tiongkok, Taiwan membentuk *Strait Exchange Foundation* (SEF). SEF adalah organisasi ‘semi pemerintah’ yang dibuka untuk membuka hubungan informal dengan Tiongkok.¹⁰⁸ Tiongkok kemudian menyusul dengan mendirikan organisasi serupa bernama *Association for Relations Across the Taiwan Straits* (ARATS).¹⁰⁹ Kedua organisasi ini yang nantinya dijadikan sebagai wadah komunikasi institusional. Hal ini mulai terlihat bahwa Taiwan mulai membuka hubungan kerjasama dengan Tiongkok, dan lebih membicarakan masalah reunifikasi secara damai.

Perubahan pandangan terhadap prinsip *One China Policy* pada masa Lee Teng Hui terlihat pada peristiwa penting yang terjadi pada awal periode kepemimpinan Lee adalah terciptanya kesepakatan antara Taiwan dan Tiongkok yang dikenal dengan Konsensus 1992. Konsensus ini adalah hasil dari pertemuan antara SEF dan ARATS yang dikenal dengan ‘*Wang-Koo Talks*’.¹¹⁰ Isi dari kesepakatan konsensus 1992 adalah kesepakatan antara pemerintah kedua belah

¹⁰⁷Phil Deans, *Op. Cit.* hal. 31

¹⁰⁸ Organisasi unformal dibentuk oleh pemerintah Taiwan untuk menangani masalah teknis dan bisnis dengan Tiongkok. Didanai oleh pemerintah dan sektor swasta dan secara langsung disahkan dan dikendalikan oleh Dewan Yuan Eksekutif untuk berinteraksi dan bernegosiasi langsung dengan Tiongkok. Lihat di <http://www.sef.org.tw/mp1.html> (29/11/2017, 13:21 WIB)

¹⁰⁹Fahmi Islami, *Op. Cit.*, hal. 7

¹¹⁰ *Speech at the Symposium Commemorating the 10th Anniversary of ‘Wang Koo Talks’*, Embassy of the People’s Republic of China in the Republic of Singapore, 18 Oktober 2004, diakses dalam <http://www.chinaembassy.org.sg/eng/dszyhd/t165679.htm> (5/12/2017, 10:15 WIB)

pihak terkait prinsip *One China Policy* dan membiarkan kedua belah pihak memiliki interpretasi masing-masing mengenai prinsip tersebut. Pragmatisme dalam kesepakatan tersebut dibuat untuk menjadi basis kerjasama yang terjadi antara kedua belah pihak.¹¹¹

Kontribusi Lee Teng Hui bagi demokratisasi di Taiwan sangat berperan penting dalam menciptakan identitas baru Taiwan. Pada 20 Mei 1996 Taiwan berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum yang pertama. Meski masih jauh dari kesan demokratis karena kekuasaan masih dipegang oleh KMT. Hal ini menunjukkan bahwa Taiwan semakin menjauhi unifikasi. Tidak hanya di bidang politik, taiwanisasi yang dibuat oleh Lee Teng Hui juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dengan bidang seni, media, dan sekolah yang mulai menggunakan bahasa *Minan* atau *Hokkien*, dialek lokal Taiwan menggantikan dialek mandarin yang dipaksakan oleh pemerintah sebelumnya.¹¹²

2.3 Prinsip *One China Policy*

Pada bab ini akan dijelaskan prinsip *One China Policy* untuk memahami pokok permasalahan pada penelitian ini. Apabila dilihat dari 3 syarat umum negara yakni wilayah, penduduk, dan pemerintah, Taiwan secara *de facto* sudah memenuhi syarat 3 unsur tersebut. Meski demikian, hal tersebut belum cukup untuk menyatakan bahwa Taiwan sebagai negara yang berdaulat. Karena secara *de jure*

¹¹¹ Fahmi Islami, *Op. Cit.*, hal. 7.

¹¹² *Ibid.*, hal. 220-221

Taiwan belum memiliki pengakuan penuh dari negara lain. Pengakuan negara lain inilah yang sangat penting bagi eksistensi Taiwan di kancah internasional.¹¹³

Hingga saat ini eksistensi Taiwan sebagai suatu negara masih dipertanyakan, terlebih berdasarkan hasil pemungutan suara di PBB pada 25 Oktober 1971 Taiwan resmi dikeluarkan dari keanggotaan PBB.¹¹⁴ Karena Taiwan dianggap wilayah provinsi dari Tiongkok. Namun, hingga kini Taiwan masih bersih kokoh bahwa Taiwan adalah negara yang setara dengan Tiongkok. Sehubungan dengan hal tersebut Tiongkok mengeluarkan kebijakan yang disebut *One China Policy*. Kebijakan *One China Policy* merupakan kebijakan ‘satu Cina’ yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok, dengan tidak mengakui Taiwan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dari Tiongkok. Meskipun ada dua pemerintah yang mengklaim sebagai Tiongkok. Hal ini sebagai penegasan bahwa suatu negara yang ingin bekerjasama atau berhubungan diplomatik baik kepada Taiwan maupun Tiongkok, negara tersebut harus memilih satu pemerintahan saja.¹¹⁵

Berkenaan dengan kesepakatan konsensus 1992 *Wang-Koo Talks* bahwa baik Tiongkok maupun Taiwan berhak memiliki interpretasi dan pandangan masing-masing mengenai makna prinsip *One China Policy*.¹¹⁶ Hal ini membuat perbedaan sudut pandang *One China Policy* antara Tiongkok, Taiwan, bahkan negara adikuasa Amerika.¹¹⁷ Berdasarkan U.S .-Cina *Joint Communiqué* pada 17

¹¹³ Prof. Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 51-54.

¹¹⁴ Grace Lestariana Wonoadi, S.IP, M.SI, *Menelisik Kedaulatan Taiwan*, UMY, diakses dalam <http://hi.umy.ac.id/menelisik-kedaulatan-taiwan/> (5/12/2017, 10:48 WIB).

¹¹⁵ Yang Leprilian, *Op. Cit.*, hal. 75.

¹¹⁶ Wei-chein Lee, *Outside or Inside the Box of the 1992 Consensus: Taiwan's 2016 Elections and Cross Strait Relation's*, Wake Forest University, hal. 5.

¹¹⁷ Yosias Marion Arthur Wabiser, *Op.Cit.*, hal 4

Agustus 1979 AS mengakui bahwa hanya ada satu Cina, dan Taiwan adalah bagian dari Tiongkok.¹¹⁸ Akantetapi, seiring cara yang ditempuh untuk menerapkan kebijakan *One China Policy* kemudian mengalami perubahan dari satu era kepemimpinan ke era kepemimpinan lainnya.

2.3.1 *One China Policy* versi Tiongkok

Terdapat komplikasi bahasa pemaknaan pada kata 'Cina' yang tidak pernah dibahas tiga komunikatif bersama *Joint Communique* pada 17 Agustus 1979.¹¹⁹ Pada kesepakatan tersebut Amerika Serikat mengakui Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah, dan Tiongkok tidak pernah mengakui Taiwan sebagai pemerintahan yang sah. Akantetapi, atas usulan Deng Xioping pada dibuat kebijakan yang diimplementasikan dalam *One State Two System* untuk mendefinisikan Taiwan sebagai daerah Administratif khusus di bawah Tiongkok pasca unifikasi.¹²⁰

Kebijakan *One China Policy* versi Tiongkok sendiri merupakan kebijakan yang lahir akibat penyerahan kekuasaan Jepang atas pemerintahan Taiwan kepada Tiongkok yang kala itu diwakili oleh Chiang Kai Shek. Dalam deklarasi penandatanganan Instrumen Penyerahan pada tanggal 25 Oktober 1945,¹²¹ menjelaskan bahwa pemerintahan Chiang Kai Shek mewakili seluruh daratan Tiongkok termasuk Taiwan. Bahkan setelah kekalahan KMT yang dipimpin oleh

¹¹⁸ Kerry Dumbaugh, Op. Cit., hal. 6

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Shirley A Kan, China, Taiwan: Evolution of the "One China" diakses dalam <http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/crs/r30341.pdf> (1/11/2017, 22.15 WIB).

¹²¹ White paper: The One China Principle and the Taiwan Issue, China Embassy, Embassy of the People Republik of China in the United States of Amerika, diakses dalam <http://www.china-embassy.org/eng/zt/twwt/White%20Papers/t36705.htm> (7/12/2017, 21:00 WIB).

Chiang Kai Shek lari ke Taiwan, Ia tetap menggunakan nama *People Republik Of China* sebagaimana yang digunakan di Tiongkok. Hal ini membuktikan bahwa Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok.¹²²

Mengapa kebijakan *One China Policy* versi Tiongkok memandang bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok? Jika dilihat dari sejarah panjang revolusi Tiongkok, Taiwan telah diamanatkan langsung oleh pemerintah Jepang kepada KMT yang pada waktu itu berkuasa di Tiongkok. Namun, akibat kekalahan KMT yang lari ke Taiwan, menyebabkan PKC berkuasa di Tiongkok sebagai negara Komunis. Oleh karenanya, ketika ketua KMT Chiang Kai-Shek lari bersama jutaan pendukungnya sebenarnya Ia telah kehilangan hak-haknya untuk menjalankan kedaulatannya atas nama Tiongkok. Karena, KMT tidak lagi berkuasa di Tiongkok.

Point utama dalam *One China Policy* versi Tiongkok pada masa Deng Xioping adalah*China will do its best to achieve peaceful reunification, but will not commit itself to rule out the use of force, will actively promote people-to-people contact and economic and cultural exchanges between the two sides of the Taiwan Straits, and start direct trade, postal, air and shipping services as soon as possible, achieve reunification through peaceful negotiations and on the premise of the One China Principle, any matter can be negotiated*¹²³

Sebelum Tiongkok dipimpin oleh Deng Xioping, di era pemerintahan Mao Zedong 1953-1959.¹²⁴ Ia sangat berambisi untuk menghancurkan KMT yakni melalui *military liberation*. Tujuannya untuk menyatukan wilayah-wilayah yang masih dikuasai KMT agar tunduk pada pemerintahan Komunis, salah satunya yakni

¹²² Fiqarrahmadani Yustiazari, *Op. Cit.*

¹²³ *The One China Principle and the Taiwan Issue*,
<http://www.china.org.cn/english/taiwan/7956.htm>, (1/11/2017, 16:31 WIB)

¹²⁴ Fiqarrahmadani Yustiazari, *Op. Cit.*

Taiwan.¹²⁵ Namun, berdasarkan pada penjelasan diatas rupanya di era Deng Xioping, Ia memiliki inisiatif damai untuk menyatukan wilayah Taiwan melalui *One State Two System* dengan maksud ingin menjalin kerjasama. Karena keadaan Tiongkok saat itu mengalami krisis ekonomi. *One China Policy* pada saat itu lebih diterapkan sebagai instrument untuk modernisasi ekonomi di Tiongkok. Karena dengan *One China Policy* Tiongkok berhak mengontrol sepenuhnya keseluruhan pemerintahan daratan Tiongkok, termasuk Taiwan.¹²⁶

Kebijakan *One China Policy* versi Tiongkok menegaskan bahwa hanya ada satu negara 'Cina' di dunia ini, makna 'Cina' yang dimaksud yakni Tiongkok itu sendiri. Hal ini memberikan arti bahwa Tiongkok tidak mengakui Taiwan sebagai negara yang sah dan berdaulat dari Tiongkok. Sehingga untuk menegaskan bahwa hanya ada satu pemerintahan 'Cina' yakni Tiongkok, Tiongkok membuat kebijakan bahwa negara yang ingin berhubungan diplomatik dengan Tiongkok, negara tersebut harus memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Dengan hak tersebut Tiongkok berupaya melokalisasi Taiwan sebagai wilayah administrasi khusus dan berusaha mendevaluasi otoritas Taiwan untuk mengembangkan hubungan Taiwan-Tiongkok.¹²⁷

Selain itu, pemerintah Taiwan akan terdesak posisinya karena secara *de jure* Taiwan tidak memiliki dukungan pengakuan yang kuat dari negara-negara internasional. Hal ini yang membuat Taiwan bersedia atau tidak bersedia, harus

¹²⁵ Parris H. Chang, *Beijing's Unification Strategy toward Taiwan and Cross- Strait Relation*, The Korean Journal of Defense Analysis, Vol, 26, No, 3 (September 2014), hal. 300.

¹²⁶ Drs. Leo Agung, M.PD, *Op. Cit.*, hal 59

¹²⁷ Po Lin-Pan, *The Constructions of Taiwanese as Chinese: A Public Relation Approach to Explore Chinese Leader's Discourse*, University of Alabama, diakses dalam <http://web.uri.edu/iaics/files/21-Po-Lin-Pan.pdf> (08/11/2017, 13:26 WIB)

menjalin kerja sama dengan Tiongkok. Adanya interdependensi antara Tiongkok-Taiwan, menjadi peluang bagi Tiongkok untuk menarik Taiwan agar bersedia reunifikasi dengan Tiongkok.¹²⁸

Upaya pendekatan Tiongkok terhadap Taiwan terus dilakukan melalui *Peacefull Reunification* yakni membebaskan Taiwan dari kekerasan militer pada masa Mao Zedong. Desakan untuk reunifikasi lebih ditekankan ketika pihak NPC (*National People Congress*) yang diketuai Ye Yiajin pada 30 September 1981 mengirimkan pesan kepada Taiwan berupa sembilan proposal untuk mengatasi permasalahan Taiwan atau 'Inisiatif Beijing' yang berisi:¹²⁹

1. Mengakhiri pemisahan yang disayangkan dari bangsa China secepat mungkin dengan menghimbau agar Partai Komunis dan Partai Nasionalis dapat bekerjasama untuk penyatuan kembali bangsa China.
2. Reunifikasi merupakan hal yang sangat mendesak bagi Bangsa China yang terpisah terkait konflik Selat Taiwan tersebut untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya, bersatu kembali dengan kerabat mereka yang saling terpisah, mengembangkan perdagangan dan meningkatkan pemahaman yang berkualitas. Kami mengusulkan kedua belah pihak membuat persiapan untuk memfasilitasi pertukaran surat, perdagangan, pelayanan lintas udara dan laut, pertukaran akademik, pertukaran budaya, olahraga, dan menjangkau perjanjian selanjutnya.

¹²⁸ I Gede Candra Prayogi, *Op.Cit* hal. 5-8, diakses dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=195983&val=5807&title=UPAYA%20REUNIFIKASI%20TAIWAN%20DITINJAU%20DARI%20PERKEMBANGAN%20KONFLIK%20SELAT%20TAIWA%20PERIODE%201981-1991> (4/9/2017, 09:42)

¹²⁹ *Ibid.*, hal 4.

3. Setelah negara disatukan kembali, Taiwan akan mendapatkan otonomi tinggi sebagai daerah administrasi khusus dan Taiwan dapat membentuk angkatan bersenjataanya. Selain itu, pemerintah pusat pun tidak dapat mengintervensi urusan lokal di Taiwan.

4. Sistem sosial ekonomi Taiwan tidak akan dirubah seperti: cara hidup, perekonomian, dan hubungan dengan pihak asing. Tidak ada gangguan pada hak-hak milik dan hak hukum penuh terhadap warisan atas property pribadi, rumah, tanah, dan perusahaan, ataupun investasi asing.

5. Orang-orang terkemuka atau tokoh-tokoh dalam otoritas dan perwakilan dari berbagai lingkungan di Taiwan dapat mengambil jabatan dari kepemimpinan dalam lembaga politik nasional dan berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan.

6. Ketika keuangan daerah Taiwan sedang mengalami kesulitan, pemerintah pusat dapat mensubsidi untuk memperbaiki keadaannya.

7. Untuk orang-orang dari semua kebangsaan Cina dan tokoh public dari berbagai lingkungan di Taiwan yang berharap untuk datang dan menetap di daratan Tiongkok, dijamin bahwa tidak akan ada diskriminasi terhadap mereka, dan mereka akan mempunyai kebebasan untuk masuk maupun keluar.

8. Kaum industrialis dan pebisnis di Taiwan akan disambut dengan baik untuk berinvestasi dan menjalankan berbagai aktivitas ekonomi di daratan Tiongkok dan hak legal mereka kepentingan, dan keuntungan yang mereka dapatkan itu dijamin.

9. Unifikasi dari tanah air merupakan tanggung jawab dari seluruh bangsa Cina. Kami sungguh-sungguh menyambut orang-orang dari seluruh bangsa Cina, tokoh publik dari semua lingkungan dan semua organisasi massa di Taiwan untuk membuat proposal dan saran mengenai urusan-urusan negara melalui berbagai jaringan dan dalam berbagai cara.

2.3.2 *One China Policy* versi Taiwan

Pada awalnya kebijakan *One China Policy* versi Taiwan pada masa pemerintahan Chiang Kai Shek lebih pronunifikasi karena Ia terikat dengan deklarasi yang ditandatangani bahwa pemerintahannya mewakili seluruh daratan Tiongkok, termasuk Taiwan. Sehingga makna ‘Cina’ pada saat itu adalah pemerintah Tiongkok maupun Taiwan adalah satu pemerintahan yang sama, karena Chiang Kai Shek merasa bahwa Tiongkok masih berada di dalam naungan pemerintahannya.¹³⁰ Atas dasar tersebut Chiang Kai Shek menerapkan prinsip *One China Policy* untuk membentuk identitas masyarakat Taiwan agar merasa bagian dari Tiongkok. Meski keduanya telah dipimpin oleh dua entitas yang berbeda, pemerintah Tiongkok di bawah kendali Komunis, dan Taiwan di bawah kendali Nasionalis KMT.

Sejak dikeluarkannya Taiwan dari representasi Tiongkok di PBB pada tahun 1971 pada era Chiang Cheng Kuo, posisi Taiwan semakin terkucilkan. Normalisasi hubungan Tiongkok-Amerika Serikat menghasilkan *U.S-Cina Joint Communiqué* yang membahas prinsip *One China Policy*, bahwa Amerika Serikat mengakui

¹³⁰ Kristine Yeh Koopman, *Taiwan's Path to Independence: Resolving the "One China" Dispute*, diakses dalam http://cardozoicr.com/wp-content/uploads/2016/11/CAC107_crop.pdf (2/11/2017, 08:36 WIB)

Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintah yang sah, Tiongkok juga tidak pernah mengakui pemerintah Taiwan.¹³¹ Chiang Cheng Kuo mengambil langkah untuk bersikap dingin terhadap Tiongkok dengan mengeluarkan kebijakan *Three no policy* yakni tidak ada kontak, negosiasi, dan kompromi antara Tiongkok dan Taiwan. Namun, untuk mengimbangi *power* Tiongkok Amerika Serikat kemudian membuat kesepakatan *Taiwan Relations Act* pada tahun 1979 terkait perdagangan persenjataan.

Dukungan Amerika Serikat kepada Taiwan adalah sebuah variabel yang sangat mempengaruhi pemimpin Tiongkok terkait keputusannya untuk secara tegas melawan Taiwan. Sebaliknya, hal tersebut juga berpengaruh pada putusan Taiwan untuk merdeka dari Tiongkok. Interaksi Taiwan-Tiongkok sangat menentukan posisi dan kondisi yang terjadi terkait *cross-strait relations*. Dimana interaksi tersebut akan memberikan sinyal kepada Taiwan-Tiongkok untuk menentukan masa depan mereka. Sehingga mereka akan terdorong untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya yakni Tiongkok yang menginginkan unifikasi dan Taiwan yang menginginkan independen.

Melihat Tiongkok yang secara diplomatik semakin agresif dan kondisi tidak berpihak pada Taiwan. Chiang Cheng Kuo mulai membuka hubungan diplomatik untuk berupaya mencari dukungan dan pengakuan terhadap eksistensi Taiwan di ranah internasional yang mengarah pada posisi Taiwan yang *proindependeen*. Meningkatnya representasi sekitar 70% yang duduk di kursi KMT mendesak

¹³¹ Kerry Dumbaught, *Op. Cit.*, hal. 1.

Chiang Cheng Kuo membuat kebijakan *Taiwanese* untuk menggantikan nasionalisasi Cina yang diterapkan oleh rezim ayahnya.¹³²

Desakan Tiongkok kepada Taiwan untuk unifikasi melalui kebijakan *One China Policy* makin menguatkan nasionalisme Taiwan, terutama ditubuh KMT. Chiang Ching Kuo secara langsung mengangkat Lee Teng Hui sebagai presiden penggantinya pada tahun 1988.¹³³ Tujuannya adalah agar ada orang asli Taiwan yang dapat mempertahankan relevansi dan legitimasi nasionalis KMT. Legitimasi Lee Teng Hui sebagai keturunan asli Taiwan menjadi pendukung gerakan-gerakan perbaikan di Taiwan. Ia mengawali proses *Taiwanese* atau nasionalisasi Taiwan yang cukup panjang untuk membentuk identitas Taiwan itu sendiri.¹³⁴

Pencapaian awal untuk menciptakan identitas Taiwan Baru diawali dengan menarik orang-orang asli Taiwan untuk menjabat di KMT. Hal ini agar terbentuk sistem pemerintah Taiwan *to* Taiwan. Pada bulan September 1995 Lee Teng Hui berbicara secara terbuka terkait *Taiwanese*.

“...the Koumintang chairman is a Taiwanese, its secretary-general is a Taiwanese, its director of the Organization Department is a Taiwanese. The Koumintang long ago Taiwanized. It would only be correct to call it the Taiwan Koumintang.....”¹³⁵

Berdasarkan kutipan pidato diatas kata ‘the Taiwan Koumintang’ memberikan makna bahwa identitas Taiwan adalah Nasionalis Koumintang. Bila

¹³² Cristopher Hughes, *Op. Cit.*, hal. 51

¹³³ Jonathan Manthroe, *Op. Cit.*, hal 219

¹³⁴ Dafydd Fell, 2015, *Party Politics in Taiwan: Party Change and the Democratic evolution of Taiwan 1991-2004*, New York: Routledge, hal 12

¹³⁵ Brunce Jacobs., *Op. Cit.*, hal. 385.

dicermati proses konstruksi identitas yang diterapkan Lee Teng Hui digunakan untuk memupuk nasionalisme masyarakat Taiwan terhadap tanah air mereka.

Merespon kebijakan *One China Policy* yang dikeluarkan oleh Tiongkok, khususnya pada masa Deng Xioping. Lee Teng Hui sebagai presiden pertama Taiwan berusaha merevisi kembali makna 'Cina' pada kebijakan *One China Policy*. Sebagai permulaan Lee Teng Hui menanggapi pesan sembilan poin 'Inisiatif Beijing' yang menawarkan formula kerja sama sebagai basis *peacefull unification* dengan membentuk Dewan Unifikasi Nasional.

Dewan Unifikasi Nasional menghasilkan *Guideline on National Reunification* pada tahun 1991. *Guideline* tersebut berisi penjelasan mengenai pandangan Taiwan terhadap tiga proses dalam pencapaian unifikasi. Pertama, adanya pertukaran dan timbal balik antara kedua belah pihak dalam tahap pertama, membangun kepercayaan bersama dan kerjasama seperti pembukaan hubungan langsung sebagai tahap kedua, dan diakhiri dengan proses konsultasi dan unifikasi.¹³⁶

Permasalahan Taiwan-Tiongkok pada waktu itu semakin kompleks karena tidak adanya kontak resmi untuk menyelesaikan masalah antar selat. Hal ini yang mengakibatkan pemerintah kedua belah pihak tidak mampu menangani masalah yang timbul secara langsung. Kemudian, pemerintah Taiwan di masa Lee Teng Hui mempercayakan organisasi 'semi pemerintah' yakni *Strait Exchange Foundation* (SEF) pada bulan maret 1991 untuk menjalankan otoritas publik terkait masalah lintas batas antara Taiwan-Tiongkok. SEF pertama kalinya diketuai oleh Koo Chen

¹³⁶ Phil Deans, *Op. Cit.*, hal. 31

fu, yang didanai oleh pemerintah dan sector swasta. SEF merupakan satu-satunya lembaga di Taiwan yang ditunjuk langsung oleh Dewan Yuan Eksekutif dan secara sah memiliki wewenang sebagai sarana berinteraksi dan bernegosiasi terkait hubungan Taiwan-Tiongkok. Kemudian, pada Desember 1991 Tiongkok mendirikan organisasi serupa *Association for Relations Across the Taiwan Straits* (ARATS) yang diketuai Wang Dohan.¹³⁷

Pertemuan dialog SEF dan ARATS membuahkan hasil dengan terciptanya kesepakatan antara Taiwan-Tiongkok yakni Konsensus 1992 atau dikenal juga dengan istilah *Wang-Koo Talks*. Berdasarkan konsensus 1992 *Wang Koo-Talks* pemerintah kedua belah pihak berhak memiliki interpretasi tersendiri terhadap kebijakan *One China Policy* terkait masalah unifikasi. Pragmatisme dalam kesepakatan tersebut dibuat untuk menjadi basis kerjasama yang terjadi antara kedua belah pihak.¹³⁸

Hasil dari konsensus 1992 merupakan strategi Lee Teng Hui sebagai jalan tengah untuk meredakan sengketa *cross-strait relation* menjadi *status quo*. Makna ‘Cina’ yang dimaksud Taiwan adalah ‘Cina’ yang mengindikasikan Taiwan. Sedangkan penafsiran makna ‘Cina’ yang dimaksud Tiongkok adalah ‘Cina’ yang mengindikasikan Tiongkok. Hal ini timbul karena ketika disepakati konsensus 1992 pihak Taiwan pernah mengusulkan agar Tiongkok-Taiwan menyatakan isi *One China* secara lisan. Akantetapi, pihak Tiongkok tidak menyetujui usulan tersebut, tapi dengan tindakan tidak menolak secara eksplisit. Dengan demikian, Taiwan-

¹³⁷ <http://www.sef.org.tw/mp1.html>, (26/10/2017, 07:29 WIB)

¹³⁸ Wei-chein Lee, *Op. Cit.*, hal. 5.

Tiongkok akan mengekspresikan interpretasi *One China*. Namun, pemerintah Tiongkok akan tetap mempertahankan prinsip *One China Policy* dan konsisten terhadap penafsiran ‘Cina’ yang tidak disentuh dalam perundingan.

Perdebatan terkait posisi Taiwan dalam penafsiran *One China Policy* versi Taiwan didasarkan pada argument Lee Teng Hui terkait makna Cina itu sendiri bahwa “.....*I deeply feel that the difficulties we meet are all related to the national name, ‘Republic of China’¹³⁹, not being realistic. If we want to solve this problem, we must start with correcting Taiwan’s name. We must make the nation of Taiwan and it’s national name fit the fact. Not so long ago, I said: “The Republic of China does not exist. “This sentence received criticism from some people. But I did’nt speak carelessly. I spoke this sentence in accord with historical fact. First, in 1912 when the Republic of China was established, it didn’t include Taiwan. Second, when the second World War ended, the Republic of China military occupied Taiwan. Taiwan’s true status should have been land belonging to no one in accord with it’s international status being undecided. It was not territory that originally belonged to the Republic of China. Third, after 1949 the mainland territory of The Republic Cina was accupied by the Chinese Communist. So, in reality the Republic Of China already had no land only it’s national name exited. Even though the national name of the ‘Republic of China’ was hung in Taiwan, ever since the people’s Republic of China replaced the Republic of China at the United Nations in 1971, the Republic of China has disappeared in international society. These are the historical fact that the Republic of China already does not exist ”¹⁴⁰*

Sebelum berdirinya Tiongkok pada tahun 1912, Taiwan bukan termasuk bagian Tiongkok. Namun, pasca kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Taiwan diamanatkan kepada pemerintah KMT di Tiongkok yang diduduki sebagai wilayah pemerintahan darurat militer. Akibat kedudukan KMT yang melemah di Tiongkok karena serangan PKC. Membuat KMT mengalami kekalahan dan lari mengungsi ke Taiwan. Taiwan adalah wilayah yang dipandang strategis sebagai pelarian karena Taiwan bukan tempat yang direbut dari perjuangan Tiongkok tapi wilayah yang diamanatkan oleh pemerintah Jepang kepada KMT.

¹³⁹ Pada masa rezim Chiang ia menggunakan nama Republik Cina sebagaimana yang digunakan oleh daratan Tiongkok.

¹⁴⁰ Brunce Jacobs, *Op. Cit* hal 391

Orang-orang KMT tadi merasa adalah orang Tiongkok yang terusir dari negaranya sendiri, dan posisinya sudah pindah ke wilayah Taiwan. Sejatinya wilayah Taiwan bukan milik siapapun sesuai dengan status internasionalnya yang sampai saat ini belum ditentukan. Meskipun pada pemerintahan Chiang Kai-shek di Taiwan, Ia menggunakan nama *Republik Of China*, itu karena dulunya mereka adalah orang-orang KMT yang berasal dari Tiongkok. Sedangkan jika dilihat dari posisi pemerintahan KMT di Taiwan, pada masa Lee Teng Hui hampir mayoritas kursi pemerintahan dipegang oleh orang-orang Taiwan sendiri. Dan sejak Tiongkok diduduki Komunis, *Republik of China* sudah tidak memiliki lahan. Meskipun nama *Republik of China* digantung di Taiwan, tapi hanya nama nasionalnya yang pernah ada. Karena, sejak Taiwan dikeluarkan dari representasi Tiongkok pada tahun 1971 dengan nama *Republik of China*. Menandakan bahwa *Republik of China* sudah lenyap dari pandangan masyarakat Internasional.

Peristiwa terpilihnya presiden Lee Teng Hui dipemilu untuk yang pertama kalinya di Taiwan pada tanggal 20 Mei 1996 yang berasal dari partai Nasionalis KMT memiliki peranan penting dalam merubah jalur perpolitikan di Taiwan. Partai KMT tentunya memiliki agenda tersendiri, yang mana agenda tersebut sangat mempengaruhi kebijakan luar negri Lee Teng Hui dalam hal ini masalah terkait reunifikasi Taiwan-Tiongkok. Dalam pidato pengukuhan Presiden Lee Teng Hui menyatakan:

.....*Today, the Chinese people enter a new frontier full of hope. Today, we in Taiwan firmly tell the world with great pride and self confidence: We now stand on the apex democratic reform and will remain there resolutely, we have proved eloquently that the Chinese are capable of practicing democracy, we have*

effectively expanded the influence of the international democratic camp and made significant contributions to the cause of freedom and democracy.”¹⁴¹

Terdapat tiga poin penting dalam pidato diatas dijelaskan: *Pertama*, Taiwan sedang berada di puncak reformasi demokrasi dan akan tetap teguh pada demokrasi. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sekuat apapun serangan dari luar, dalam hal ini pertikaian Taiwan-Tiongkok terkait unifikasi. Taiwan akan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai demokrasi yang dianut. Peristiwa Pemilu di era Lee Teng Hui merupakan cerminan mengenai pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi. *Kedua*, Taiwan telah membuktikan sebagai orang Tionghoa, negara tersebut mampu menerapkan nilai-nilai demokrasi. Diadakannya Pemilu pada era Lee Teng-Hui membuktikan bahwa Taiwan mampu menerapkan nilai-nilai demokrasi sesungguhnya. *Ketiga*, Taiwan mampu memperluas pengaruh demokrasi secara internasional dan dibuat sebagai sebuah kontribusi yang signifikan terhadap kebebasan dan demokrasi. Jadi, keberhasilan Taiwan dalam pemilu merupakan kemenangan demokrasi yang menyeluruh bagi rakyat Taiwan dan dunia internasional, yang merupakan sebuah kontribusi terhadap nilai-nilai kebebasan dan demokrasi.

Selain itu, Lee Teng Hui juga menekankan pada masyarakat Taiwan bahwa konsensus yang disepakati akan membawa Taiwan ke era baru. Menuju Taiwan yang modern, dalam hal ini dengan memperluas dan lebih memperdalam nilai-nilai demokrasi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan ekonomi

¹⁴¹ Appendix 85- Presiden Lee Teng Hui Innagural Address 1996, hal 1 diakses dalam http://www.straittalk88.com/uploads/5/5/8/6/55860615/appendix_85_%E2%80%93_president_lee_teng-hui_inaugural_address_1996_.pdf (1/11/2017, 22:56 WIB)

dan perencanaan pembangunan nasional yang matang, khususnya di kawasan Asia-Pasifik. Selain itu di sektor non-ekonomi juga akan lebih ditingkatkan yakni pada sistem peradilan, pendidikan, budaya, dan restrukturisasi social yang akan bergerak maju secara bersamaan.

Reformasi peradilan yang dimaksud oleh Lee teng Hui adalah melalui peraturan undang-undang, yang mana merupakan hokum fondasi demokrasi. Reformasi pendidikan juga dibentuk, agar generasi masyarakat Taiwan memiliki pengetahuan luas tentang tanah air mereka, mencintai negara mereka, dan memiliki pandangan luas terhadap masa depan negaranya. Dengan demikian, generasi muda dapat menghadapi tantangan global dan mampu memetakan masa depan yang cerah untuk negaranya. Terkait reformasi kebudayaan, Lee Teng Hui menginginkan regenerasi budaya, yakni budaya orang-orang Taiwan yang baru. Budaya Taiwan baru baginya adalah budaya Tionghoa baru yang memanfaatkan esensi budaya Barat. Tujuannya adalah untuk mengelola Taiwan yang hebat melalui budaya dan masyarakat baru. Bahkan Lee Teng Hui menyatakan bahwa perselisihan Tionghok-Taiwan tidak ada kaitannya dengan persoalan identitas etnik dan budaya.¹⁴²

Pada pidato *National Unification Council* 22 Juli 1988, Lee Teng-Hui menegaskan: *"....China must be reunified 'but' this reunification must be under a system of democracy, freedom and equitable prosperity that will safeguard the right and interests of all Chinese, and is in keeping with the global trend. The national should, by no means, be reunified under the proven failure of communism or the so-called 'one country, two system' formula. Lee later critized: the one country, two system schame as making very unequal distinction between central and local and being undemocratic in that power is exercised from the top down and not from the botton up. Lee reaterated, "Our long term goal is peaceful unification of China under principles of democracy, freedom and equitable prosperity for all".*¹⁴³

¹⁴² Appendix 85- Presiden Lee Teng Hui Innagural Address 1996, *Ibid.*, hal 29-31.

¹⁴³ Brunce Jacobs., *Op. Cit* hal 387

Kepentingan Taiwan-Tiongkok sangat berpengaruh pada keputusan hubungan *cross-strait relation* antara kedua belah pihak. Jika pemimpin Tiongkok yakin bahwa masa depan mengarah lebih baik menuju unifikasi, maka Tiongkok akan cenderung melakukan tindakan tidak bermusuhan. Sebaliknya, jika pemimpin Taiwan melihat bahwa sistem perpolitikan Tiongkok akan lebih demokratis, atau menjadi lebih mirip dengan sistem Taiwan, maka hal tersebut akan mengurangi kekhawatiran Taiwan untuk bergantung pada Tiongkok.

Pada tanggal 9 Juli 1999 dalam sebuah wawancara Lee Teng Hui menyatakan bahwa hubungan antara Cina dan Taiwan adalah *special state to state relation*¹⁴⁴ atau hubungan khusus antara dua negara.

”.....kami tidak lagi menganut formulasi ambisus “Satu Cina” yang menganggap daratan Tiongkok dan Taiwan adalah dua bagian dari negara yang sama. Kami akan beropasi atas dasar ‘negara dengan negara’ dengan RRC, dan menuntut Beijing untuk memperlakukan Taiwan sederajat selayaknya sebuah negara.....¹⁴⁵

Pernyataan diatas sangat jelas sekali bahwa Lee Teng Hui berupaya memberikan penegasan terkait interpretasi Taiwan terhadap *One China Policy* bahwa Taiwan dan Tiongkok memiliki hak dan kedaulatan masing-masing. Masing-masing dari keduanya merupakan dua pemerintah yang berbeda, yang dipimpin oleh entitas yang berbeda. Bahkan seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, perselisihan Taiwan-Tiongkok tidak ada kaitannya dengan

¹⁴⁴Shirley A. Kan, *Appendix 100: Taiwan's Lee Teng Hui on Special State to State Relations* (1999), diakses dalam [http://www.straittalk88.com/uploads/5/5/8/6/55860615/appendix_100 - taiwans lee teng-hui on special state-to-state relations_1999 .pdf](http://www.straittalk88.com/uploads/5/5/8/6/55860615/appendix_100_-_taiwans_lee_teng-hui_on_special_state-to-state_relations_1999.pdf) (5/9/2017, 00:00 WIB)

¹⁴⁵Ipan Saputra Winata, *Op. Cit.*, hal. 32 diakses dalam <http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/11/jbptunpaspp-gdl-ipansaputr-502-1-skripsi-a.pdf> (2/10/2017, 22:24 WIB)

persoalan etnik dan budaya. Karena Taiwan memiliki konsep nilai-nilai budaya baru, dan tetap akan teguh terhadap nilai-nilai demokrasi.

Meskipun terdapat dua pemerintahan yang mengklaim dirinya adalah ‘Cina’, akantetapi *One China Policy* menegaskan bahwa negara-negara di dunia yang ingin bekerjasama baik dengan Taiwan maupun Tiongkok, negara tersebut hanya boleh memilih satu pemerintahan saja. Kebijakan tersebut membuat Taiwan terisolasi. Hingga pada tahun 2014 hanya terdapat 22 negara di dunia yang memiliki hubungan diplomatik penuh dan mengakui bahwa Taiwan adalah satu-satunya negara yang sah yang mewakili seluruh daratan Tiongkok. Namun, Negara-negara tersebut adalah negara-negara yang kecil yang memiliki sedikit pengaruh dalam dunia politik hubungan internasional.¹⁴⁶

Gambar 2.2 Negara-Negara yang Memiliki Hubungan Diplomatik Dengan Taiwan¹⁴⁷



¹⁴⁶ Yang Leprilian, *Op. Cit.*, hal. 76.

¹⁴⁷ AFP, *Dua Negara Putus Hubungan Diplomatik dengan Taiwan*, Media Indonesia, diakses dalam <http://mediaindonesia.com/news/read/83898/dua-negara-putus-hubungan-diplomatik-dengan-taiwan/2016-12-22> (4/9/2017, 10:28 WIB)